

IMPLIKASI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENINGKATAN POTENSI PAJAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Oleh :

Aspa, S.Sos¹

Dr. Ismail Badollahi, S.E., M.Si., Ak., CA²

Universitas Muhammadiyah Makassar

Alamat: JL. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec. Rappocini, Kota Makassar,
Sulawesi Selatan (90221).

Korespondensi Penulis: as.28man@gmail.com

Abstract. *Investment is a very important variable in driving the economy of a region, both within the scope of the region and the country. A country that is able to achieve a high level of economic growth is one of them because it is supported by large investment flows to the country concerned. Economic growth is determined by high savings and investment. If people's savings and investment are low, then the economic growth of the community or country is also low. The local government of Selayar Islands Regency invests directly in the form of capital participation in Bank Sulselbar, BPR, PDAM and Perusda. It is hoped that the investment can have an impact on improving the community's economy so that simultaneously it can also increase local taxes. By comparing data from the 2019-2022 range, the results do not show any impact on economic growth as well as on local taxes, although PAD has increased.*

Keywords: *Investment, Local Tax, Local Original Revenue, Local Government*

Abstrak. Investasi merupakan variabel yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu wilayah, baik itu dalam lingkup daerah maupun negara. Suatu negara yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi salah satunya karena ditunjang besarnya aliran investasi ke negara yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi

ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga rendah. Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar berinvestasi langsung dalam bentuk penyertaan modal pada Bank Sulselbar, BPR, PDAM dan Perusda. Diharapkan investasi itu bisa memberikan dampak perbaikan ekonomi masyarakat sehingga secara simultan dapat pula meningkatkan pajak daerah. Dengan cara membandingkan data rentang tahun 2019-2022, hasilnya tidak menunjukkan ada dampak pertumbuhan ekonomi demikian pula pada pajak daerah, meski PAD meningkat.

Kata kunci: Investasi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah

LATAR BELAKANG

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, salah satu *core business* fungsi *treasury* adalah pengelolaan Investasi Pemerintah. Aktivitas Investasi Pemerintah dilakukan melalui penempatan sejumlah dana dan atau aset keuangan dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung, yang diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Indonesia yang menganut sistem Otonomi Daerah memberikan ruang kepada Kepala Daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya. Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Lalu “Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah”.

Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Alhusain (2017:19) menjelaskan bahwa tujuan otonomi daerah yaitu (a) Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, (b) Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat,

IMPLIKASI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENINGKATAN POTENSI PAJAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam, (c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai, (d) Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi Daerah untuk membiayai infrastruktur dan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik. Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang seharusnya didorong oleh kegiatan ekonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki posisi strategis karena merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Investasi merupakan variabel yang sangat penting dalam menggerakkan perekonomian suatu wilayah, baik itu dalam lingkup daerah maupun negara. Suatu negara yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi salah satunya karena ditunjang besarnya aliran investasi ke negara yang bersangkutan (Sulistiawati 2012). Sebenarnya, pembangunan di berbagai sektor dapat dibiayai oleh investasi pemerintah. Namun saat ini, kondisi sudah sangat jauh berbeda; pemerintah tidak bisa lagi berperan sebagai engine of growth sendirian, melainkan sangat membutuhkan keterlibatan dari setiap sektor; baik itu sektor masyarakat terlebih dari lagi dari swasta (Mahadiansar et al. 2020). Pemerintah di berbagai level baik pusat maupun daerah menghadapi kendala anggaran untuk secara mandiri menggerakkan perekonomian. Dengan kata lain, keterlibatan dunia swasta dan masyarakat secara aktif merupakan suatu keniscayaan dari

sebuah pengharapan, sehingga antara pemerintah, swasta, dan masyarakat berada di barisan yang sama dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah dan nasional.

Teori Harrod-Domar merupakan salah satu teori yang terus dipakai dan terus dikembangkan. Teori ini dicetuskan oleh Evsey Domar dan Roy Harrod, yang bekerja terpisah namun menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tingginya tabungan dan investasi. Jika tabungan dan investasi masyarakat rendah, maka pertumbuhan ekonomi masyarakat atau negara tersebut juga rendah. Hal ini bisa dijumpai pada negara maju dan berkembang, masyarakat di negara maju merupakan masyarakat yang memiliki investasi yang tinggi yang diwujudkan dalam saham, danareksa, indeks, dan bentuk investasi yang lain. Contoh paling dekat dapat dilihat bagaimana masyarakat Singapura memiliki tingkat investasi yang tinggi dibanding negara-negara di Asia Tenggara. Asumsi yang mendasari teori ini bahwa masalah pembangunan pada dasarnya adalah masalah investasi modal. Jika investasi modal sudah berkembang baik, maka pembangunan ekonomi negara tersebut juga akan berkembang baik. Maka, salah satu implikasi dalam pembangunan di Indonesia, pemerintah mendorong penanaman investasi dan hal membuat investasi tumbuh subur di Indonesia. Pemerintah Indonesia berpijak dari teori Harrod-Domar, sampai membuat suatu lembaga yaitu Penanaman Modal Nasional, karena langkah ini dianggap sebagai langkah strategis untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Teori elastisitas pajak menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi atau PDRB memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Artinya, apabila ada perubahan pada Pertumbuhan Ekonomi maka penerimaan pajak daerah juga mengalami perubahan, dimana hal ini kemudian dapat memberikan masukan bagi pemerintah bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, sehingga pemerintah dapat mendorong Pertumbuhan Ekonomi nya semakin lebih tinggi. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Bruckner (2012), bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persentase perubahan pada penerimaan pajak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak investasi terhadap ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar?

IMPLIKASI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENINGKATAN POTENSI PAJAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2. Bagaimana peningkatan potensi pajak daerah Kabupaten Kepulauan Selayar?

Tujuan

1. Untuk mengetahui dampak investasi terhadap ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Mengetahui peningkatan potensi pajak daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KAJIAN TEORITIS

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memajukan wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengelola keuangan daerah. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Investasi pemerintah daerah mencakup berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata, industri, dan lain sebagainya. Investasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Permendagri no 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah).

Investasi

1. Definisi

Ada beberapa pengertian Investasi. Pengertian investasi menurut Tandelilin (2017) merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Pada umumnya aktivitas investasi merupakan aktivitas dengan menginvestasikan sejumlah dana pada aset riil (tanah, emas, mesin atau bangunan), maupun aset finansial (deposito, saham, reksadana, sukuk, ataupun obligasi). Seorang investor menurut Handini dan Dyah Astawinetu (2020) membeli sejumlah saham dengan harapan dapat memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi tersebut.

2. Bentuk Investasi

- a. Saham; Saham merupakan saham yang tercatat dan/atau diperdagangkan di bursa efek. Selain saham, Investasi Pemerintah dapat dilakukan pada saham

yang tidak tercatat dan/atau tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Surat utang; berupa surat utang dan/atau sukuk. terdiri atas surat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, korporasi dan atau BHL, pemerintah negara lain dan korporasi dan atau badan hukum asing.
- c. Investasi langsung. Investasi langsung dilakukan melalui, pemberian Pinjaman, kerja sama investasi; dan/atau bentuk investasi langsung lainnya.

3. Investasi langsung

Investasi langsung meliputi:

- a. penyertaan modal pemerintah daerah; dan/atau
- b. pemberian pinjaman

4. Investasi Daerah

Investasi Pemerintah Daerah adalah Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. (Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah). Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Investasi pemerintah daerah dapat memberikan dampak positif terhadap potensi pajak daerah. Misalnya, pembangunan infrastruktur baru dapat meningkatkan nilai properti dan menghasilkan peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Investasi dalam sektor industri dapat menciptakan lapangan kerja baru yang berarti meningkatkan pendapatan dan pajak penghasilan. Investasi Pariwisata akan meningkatkan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Oleh karena itu, ada keterkaitan erat antara investasi Pemerintah Daerah dan potensi Pajak Daerah.

Meskipun investasi Pemerintah Daerah memiliki potensi untuk meningkatkan potensi Pajak Daerah, tetap ada tantangan yang perlu diatasi. Tantangan seperti

IMPLIKASI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENINGKATAN POTENSI PAJAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

kekurangan anggaran, kebijakan perpajakan, kesulitan dalam pengumpulan pajak, dan masalah administrasi lainnya. Namun, dengan strategi yang tepat, investasi pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi pajak daerah.

Investasi mempunyai peran ganda yakni, pertama investasi memiliki peran ganda dimana dapat menciptakan pendapatan, dan kedua, investasi memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (Jhingan, 1999).

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Sementara itu, PP Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 49 Tahun 2011 mendefinisikan Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi Astuti dan Haryanto (2006) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik pemda dan pendapatan daerah lainnya. Pendapatan Asli Daerah yang terbesar dikumpulkan melalui penerimaan berbagai pajak dan retribusi daerah. Di mana pajak dan retribusi akan mengurangi kemampuan daya beli masyarakat yang mengakibatkan menurunnya pendapatan nasional yang berdampak terhadap rendahnya pertumbuhan ekonomi. Namun, jika pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan asli daerah tersebut untuk dapat sepenuhnya digunakan sebagai penggerak roda perekonomian maka akan dapat meningkatkan pendapatan nasional yang pada akhirnya akan berdampak peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Menurut (Donald R.M. Hasibuan, 2007), Investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sama-sama memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pajak. Semakin tinggi investasi suatu daerah, semakin tinggi pajak yang diperoleh, dengan semakin besar pajak semakin mampu daerah tersebut untuk membiayai rumah tangganya sendiri. Dan dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh dari pajak, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerah tersebut juga ikut meningkat.

Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Daerah. Potensi pajak daerah mencakup pajak restoran, pajak hotel, pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah dan pajak lainnya. Dengan adanya investasi Pemerintah Daerah, potensi Pajak Daerah dapat meningkat karena pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Apabila investasi mengalami peningkatan maka akan meningkatkan perekonomian, hal ini diindikasikan kenaikan investasi akan memicu pertumbuhan ekonomi karena peningkatan penanaman modal (Todaro, 2003).

H1: Investasi daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Pajak Daerah

Implikasi

Implikasi adalah hasil atau konsekuensi yang muncul sebagai akibat dari suatu tindakan, keputusan, atau peristiwa. Ini mencerminkan dampak atau arti yang terkait dengan suatu hal. Implikasi sering kali mengacu pada implikasi praktis atau implikasi teoritis dari suatu situasi atau kejadian.

Dalam konteks "Implikasi Investasi Pemerintah Daerah dan Peningkatan Potensi Pajak Daerah," implikasi mengacu pada hasil atau konsekuensi yang terkait dengan investasi Pemerintah Daerah terhadap potensi Pajak Daerah. Implikasi dapat berupa perubahan pendapatan pajak daerah, pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kualitas hidup masyarakat, penciptaan lapangan kerja, perubahan struktur ekonomi daerah, dan sebagainya.

IMPLIKASI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENINGKATAN POTENSI PAJAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Implikasi ini penting untuk dipahami karena dapat memberikan pemahaman tentang efektivitas dan keberhasilan investasi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi pajak daerah. Implikasi ini juga dapat menjadi landasan untuk mengidentifikasi kebijakan dan tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki atau memperkuat hubungan antara investasi dan potensi pajak daerah.

Rumusan Hipotesis

Analisis mengenai implikasi investasi pemerintah daerah pada potensi pajak daerah akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak investasi tersebut terhadap keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pelayanan publik.

Apabila ada investasi daerah, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (H2) dan akan secara simultan meningkatkan pendapatan Asli Daerah dalam hal ini Pajak Daerah (H1).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan melakukan telaah terhadap sumber-sumber pustaka seperti buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen lainnya baik cetak maupun online yang relevan dengan topik yang sedang dikaji pada penelitian ini. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Galvan & Galvan 2017; Zed 2014).

Tempat dan Waktu Penelitian

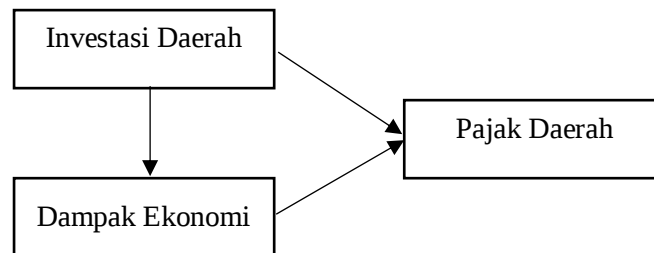
Tempat penelitian di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun waktu penelitian selama bulan Januari 2024.

Metode Pengumpulan data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Selayar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain: (1) Laju Pertumbuhan Ekonomi 2019-2022; (2) Data Realisasi

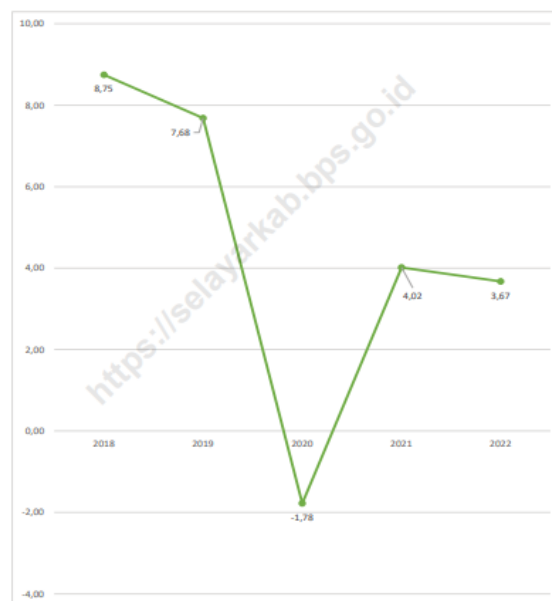
Penerimaan Pajak Daerah pemerintah kabupaten Selayar, tahun 2019 sampai dengan 2022; (3) Data Populasi Penduduk kabupaten tahun 2019 sampai dengan 2022; (4) Data Investasi Daerah kabupaten Kepulauan Selayar, tahun 2019 sampai dengan 2022, dan; (5) Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun 2019 sampai dengan 2022.

Kerangka konseptual



HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Berikut adalah data-data yang didapatkan dari unsur pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai leading sektor:
 - a. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2019-2022



Gambar 1: Laju Pertumbuhan Ekonomi 2019-2022

(Sumber: BPS Selayar)

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB tahun 2022, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 7,5 triliun rupiah dengan kontribusi dari Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) masih menjadi penyumbang terbesar

IMPLIKASI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENINGKATAN POTENSI PAJAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dengan sumbangan sebesar 43,70%. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kepulauan Selayar memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 3,67%.

- b. Data Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pemerintah kabupaten Selayar, tahun 2019 sampai dengan 2022

Tahun	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Keterangan
2019	8.960.025.365,00	
2020	7.963.533.658,50	
2021	9.627.712.505,00	
2022	11.435.621.547,00	

Tabel 1: Realisasi Pajak Daerah 2019-2022

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pemerintah kabupaten Selayar, tahun 2019 sampai dengan 2022 menunjukkan angka yang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2020 akibat covid-19.

- c. Data Populasi Penduduk kabupaten tahun 2019 sampai dengan 2022

Berikut adalah data populasi penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar:

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Keterangan
2019	135.624	
2020	137.071	
2021	137.974	
2022	139.145	

Tabel 2: Jumlah Penduduk Kab. Kepulauan Selayar (BPS tahun 2023)

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar sebesar 2,60%. Caranya dengan perbedaan jumlah penduduk kemudian dibagi dengan jumlah penduduk awal dan dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan persentase LPP. Rumus: $LPP = ((\text{Jumlah Penduduk Akhir} - \text{Jumlah Penduduk Awal}) / \text{Jumlah Penduduk Awal}) * 100$ 2. **Metode Rata-rata Pertumbuhan Tahunan (RPTA).

- d. Data Investasi Daerah kabupaten Kepulauan Selayar, tahun 2019 sampai dengan 2022.

Berikut adalah data investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar:

Tahun	Investasi Langsung				Jumlah
	Bank Sulsebar	BPR	PD Berdikari	PDAM	
2019	1.000.000.000	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	3.500.000.000
2020	1.000.000.000	500.239.000	-	-	1.500.239.000
2021	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	2.000.000.000
2022	-	-	-	-	

Tabel 3: Jumlah Penyertaan Modal Pemda Selayar

(Sumber: bag. Ekonomi Setda)

Tahun	Dividen				Jumlah
	Bank Sulsebar	BPR	PD Berdikari	PDAM	
2019	8.843.342.121	376.171.879	-	-	9.219.514.000
2020	8.939.173.251	419.102.861	-	-	9.358.276.112
2021	11.503.295.855	667.776.694	-	-	12.171.072.549
2022	11.458.731.330	656.415.375	-	-	12.115.146.705

Tabel 4: Dividen Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar

(Sumber: Bag. Ekonomi Setda)

- e. Laporan Kegiatan Penanaman Modal tahun 2019 sampai dengan 2022.

Sampai dengan hari ini belum ada investasi asing di Kabupaten Kepulauan Selayar untuk infrastruktur dan sebagainya.

2. Investasi Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar

IMPLIKASI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENINGKATAN POTENSI PAJAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Investasi daerah merujuk pada investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam wilayah administratifnya. Investasi ini dapat berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, sistem transportasi, dan fasilitas publik lainnya. Selain itu, investasi daerah juga mencakup pengembangan sektor ekonomi lokal, seperti pendirian atau perluasan industri, pengembangan pariwisata, pengembangan sumber daya manusia, dan lain sebagainya. Namun sampai dengan hari ini, investasi dalam bentuk infrastruktur belum ada sama sekali yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang diharapkan akan menjadi peluang ekonomi dan diperkirakan akan membawa dampak signifikan, belum juga mengalami perkembangan dalam arti mulai dari perencanaan hingga datangnya investor ke Selayar belum menampakkan hasil sejak dicanangkan tahun 2019. Bahkan berjalan ditempat. (<https://pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id/2020/09/2664-2/>)

3. Gambaran Ekonomi Kepulauan Selayar

Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak bisa terlepas dari data PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Berikut adalah data PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun 2019-2022

Lapangan Usaha (PDRB)		2019	2020	2021	2022	Rata ²
a	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,64	-7,12	3,27	2,62	1,60
b	Pertambangan dan Penggalian	4,27	1,44	6,91	7,66	5,07
c	Industri Pengolahan	19,9	-0,2	5,11	7,23	8,01
d	Pengadaan Listrik dan Gas	4,18	7,45	4,17	0,87	4,17
e	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	9,39	13,46	0,12	4,11	6,77
f	Konstruksi	3,84	2,01	4,12	4,56	3,63
g	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	8,94	-0,42	5,28	7,86	5,42
h	Transportasi dan Pergudangan	14,31	-19	9,98	11,67	4,24

i	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	17,9	-11,85	4,14	13,53	5,93
j	Informasi dan Komunikasi	9,31	11,33	1,42	1,63	5,92
k	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,12	4,23	0,66	0,43	2,86
l	Real Estate	3,84	10,32	1,25	0,73	4,04
m, n	Jasa Perusahaan	9,1	10,56	0,32	2,11	0,24
o	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,29	3,65	4,15	-2,22	2,97
p	Jasa Pendidikan	7,81	7,22	4,74	5,19	6,24
q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,51	12,01	9,41	8,5	10,11
r,s,t,u	Jasa lainnya	21,8	-4,95	5,77	3,12	6,44
	PDRB	7,68	-1,78	4,02	3,67	3,40

Tabel 5: PDRB Selayar 2019-2022 (sumber BPS)

Berdasarkan tabel 5 terlihat jelas bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2019 sampai tahun 2022 menunjukkan tren negatif. Meski pada tahun 2019 sempat menyentuh angka 7,68%, tetapi tahun 2020 akibat covid-19 tumbuh negatif atau berkontraksi hingga -1,78%, lalu pada tahun berikutnya positif 4,02%, kemudian negatif atau perlambatan pada tahun 2021 dan 2022. Sektor yang mengalami laju pertumbuhan rata-rata paling tinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, lalu disusul industri pengolahan dan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang. Sedangkan yang paling rendah adalah Jasa Perusahaan, di atasnya ada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, lalu Jasa Keuangan dan Asuransi.

OJK mengatur seluruh industri jasa keuangan di Indonesia yang terdiri dari industri Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Pembiayaan, Dana Pensiun, dan Industri Jasa Keuangan Lainnya. Sektor ini di Kabupaten Kepulauan Selayar cenderung mengalami stagnan. Jika dilihat dari aspek kontribusi, jasa keuangan cenderung stagnan. Bisa dilihat pada tabel dari tahun 2012-2021.

IMPLIKASI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENINGKATAN POTENSI PAJAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Lapangan Usaha (PDRB)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-Rata
A, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	42,72	42,14	43,34	43,63	44,34	44,19	43,88	43,86	41,47	41,18	43,08
B, Pertambangan dan Penggalian	0,75	0,77	0,79	0,81	0,83	0,84	0,82	0,79	0,82	0,84	0,81
C, Industri Pengolahan	3,35	3,33	3,22	3,12	3,11	3,11	2,91	3,22	3,27	3,31	3,19
D, Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15	0,14
E, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,14	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,15	0,15	0,14
F, Konstruksi	16,46	17,27	17,20	17,38	17,82	17,97	18,24	17,59	18,27	18,29	17,65
G, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	8,89	8,86	8,83	8,73	8,94	8,69	8,70	8,80	8,92	9,03	8,84
H, Transportasi dan Pergudangan	2,27	2,28	2,32	2,30	2,34	2,40	2,43	2,58	2,13	2,25	2,33
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,24	0,24	0,23	0,22	0,22	0,23	0,25	0,27	0,25	0,25	0,24
J, Informasi dan Komunikasi	3,04	3,13	3,07	3,12	3,16	3,21	3,23	3,40	3,85	3,76	3,30
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15	1,22	1,15	1,16	1,25	1,21	1,18	1,16	1,23	1,19	1,19
L, Real Estate	1,72	1,73	1,72	1,71	1,71	1,72	1,64	1,59	1,78	1,73	1,70
M,N, Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	10,26	9,99	9,47	9,34	7,79	7,63	8,13	8,02	8,46	8,48	8,76
P, Jasa Pendidikan	6,45	6,39	6,07	5,94	5,92	6,15	5,91	5,92	6,46	6,51	6,17
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,91	1,87	1,84	1,80	1,81	1,89	1,89	1,94	2,22	2,33	1,95
R,S,T,U, Jasa lainnya	0,49	0,48	0,47	0,46	0,47	0,48	0,50	0,57	0,55	0,56	0,50
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Selayar, 2023

**Tabel 6: Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Kepulauan Selayar Atas
Dasar Harga Konstan Tahun 2012-2021**

Selanjutnya kita sandingkan data investasi, dividen, pertumbuhan ekonomi dan pajak daerah:

Tahun	Jumlah Penduduk	Investasi	Dividen	Pertumbuhan ekonomi	Pajak Daerah
2019	135.624	3.500.000.000	9.219.514.000	7,68	8.960.025.365,00
2020	137.071	1.500.239.000	9.358.276.112	-1,78	7.963.533.658,50
2021	137.974	2.000.000.000	12.171.072.549	4,02	9.627.712.505,00
2022	139.145	0	12.115.146.705	3,67	11.435.621.547,00

Tabel 7: perbandingan data investasi, dividen, pertumbuhan ekonomi dan PAD

Jika kita lihat data di atas, bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Investasi naik turun, dari Rp 3,5 m, turun menjadi Rp 1,5 m, naik menjadi Rp 2 m, dan pada tahun 2022 tidak ada. Namun dari sisi dividen atas investasi yang didapatkan Pemda Selayar meningkat dari Rp 9 m menjadi Rp 12 m. Pertumbuhan ekonomi sebagaimana disebutkan di atas, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 turun drastis karena faktor *covid* tetapi pada tahun berikutnya dari tahun ke tahun pengaruh *covid-19* semakin hilang tetapi justru mengalami kontraksi. Pajak daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan kecuali tahun 2020.

Investasi Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar hanya penyertaan modal pada 2 bank, 1 Perusda dan PDAM Selayar. Laporan keuangan Perusda tidak diyakini kewajarannya pasca menjadi temuan BPK RI, sehingga tidak bisa dijadikan dasar. Maknanya impact atau dampak investasi pada Perusda tidak bisa dijadikan ukuran. PDAM selayar dalam 2 tahun terakhir tidak ada dividen kepada Pemda Selayar karena mengalami kerugian. Jadi tidak bisa memberikan impact kepada Pemda kepulauan Selayar. Lalu bagaimana dengan BPR dan Bank Sulselbar? *Dividen* pada data tersebut di atas bersumber dari kedua bank dimaksud berturut-turut dari tahun 2019 hingga 2022 yakni sebesar RP 9.219.514.000, Rp 9.358.276.112, Rp 12.171.072.549 dan Rp 12.115.146.705. Dividen ini meningkat dari tahun ke tahun meski mengalami penurunan pada tahun 2022 karena ada akumulasi penyertaan modal pada bank. Kontribusinya atas PDRB dari tahun 2019 hingga 2021 berturut-turut 1,16%, 1,23%, 1,19. Sangat kecil dibandingkan dengan sektor pertanian sebesar 43,08%.

Jika melihat data pajak daerah, hanya pada tahun 2020 mengalami penurunan lalu tahun berikutnya mengalami peningkatan. Yang menarik, pada tahun 2020 kontribusi PDRB sektor jasa keuangan meningkat menjadi 1,23% sedangkan pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi justru menurun. Dengan demikian tidak ada korelasi langsung atau dampak atas investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pertumbuhan ekonomi dan potensi potensi peningkatan pajak daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak menunjukkan adanya dampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Selayar dan secara simultan tidak menunjukkan adanya potensi peningkatan pajak daerah apabila investasi (penyertaan modal) meningkat atau menurun. Dengan demikian tidak ada korelasi langsung atau dampak atas investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan pertumbuhan ekonomi dan potensi potensi peningkatan pajak daerah, meski PAD Kabupaten kepulauan Selayar meningkat.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan bagi pengambilan keputusan pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan investasi yang lebih efektif untuk meningkatkan potensi pajak daerah.

IMPLIKASI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DAN PENINGKATAN POTENSI PAJAK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DAFTAR REFERENSI

- Astuti, Esther Sri dan Joko Tri Haryanto, 2006. “Kemandirian Daerah : Sebuah Perspektif dengan Metode Path Analysis”, Jurnal Manajemen Usahawan, Nomor 03 Th XXXV Maret 2006, Lembaga Management FE-UI, Jakarta, hal.45.
- AZ, S. M., & Pebrina, S. (2019). Analisis Pengaruh Tingkat Investasi, Pendapatan Asli Daerah dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 3(1), 36. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v3i1.54>.
- Bruckner, Markus, (2012), *An instrumental variabels approach to estimating tax revenue elasticities: Evidence from Sub-Saharan Africa*, Journal of Development Economics, Vol. 98 pp 220-227.
- Donald R.M. Hasibuan. 2007. Analisis Pengaruh PMDN dan PMA terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Sumatera Utara.
- Eduardus Tandelilin, (2017). Pasar Modal “Manajemen Portofolio dan Investasi” (G. Sudibyo (ed.)). Yogyakarta: PT. Kanisius.
- Galvan, Jose L & Galvan, Melisa C. (2017). *Writing literatur reviews : A guide for student of the social and behavior sciences. 7th arg.* California: Routledge.
- Jhingan, M. L. 1999. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka Tahun 2023. Badan Pusat Statistik.
- Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, “Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual, Akuntansi Investasi”.
- Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar BPK RI Tahun 2022. (2023)
- Mahadiansar, M., Setiawan, R., Darmawan, E., & Kurnianingsih, F. (2021). Realitas Perkembangan Investasi Asing Langsung di Indonesia Tahun 2019. *Matra Pembaruan*, 5(1), 65–75. <https://doi.org/10.21787/mp.5.1.2021.65-75>.
- Permendagri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah.

- Rahayu, T. I. (2010). Teori Pembangunan Dunia Ke-3 Dalam Teori Modernisasi Sub Teori Harrod-Domar. *Gema Eksos*, 6(1), 69–82. Retrieved from <https://ejurnal.unisfat.ac.id/index.php/jg/article/view/193>.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(1), 29–50.
- Todaro, Michael, P. dan Stephen C. Smith. 2003 . *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi kedelapan. Jakarta : Erlangga.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- <https://pariwisata.kepulauanselayarkab.go.id/2020/09/2664-2/>
- <https://celebesnews.co.id/2023/11/30/kejati-dan-polda-sulsel-didesak-audit-keuangan-perusda-berdikari-selayar/>
- <https://pedomanrakyat.co.id/2022/11/05/kasus-dugaan-korupsi-ratusan-juta-rupiah-di-pdam-selayar-dilimpahkan-ke-pengadilan-tipikor-makassar/2/>